

Unit 5

PENGEMBANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH

Hari Sunaryo
Lise Chamisijatin

Pendahuluan

Saudara, kebijakan otonomi daerah merembet juga ke persoalan pendidikan. Semenjak digulirkannya isu manajemen berbasis sekolah dan menjadi puncaknya pada otonomi pendidikan, persoalan yang berkait dengan dunia persekolahan menjadi kian dinamis. Berkembangnya iklim demokrasi mendorong diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah diikuti dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

Dengan demikian, perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik, dunia pendidikan pun menjadi “hiruk-pikuk”, semarak, dan sekaligus semakin kompleks. Apabila pada awalnya dunia persekolahan terkesan sebatas dunianya pemerintah, kepala sekolah, dan guru, sekarang menjadi dunia yang demikian terbuka dan menjadikan banyak pihak dapat terlibat. Dalam kondisi seperti itu, persoalan kurikulum tidak semata urusan sekolah (kepala sekolah dan guru), melainkan pula menjadi urusan banyak pihak lainnya seperti orang tua murid dan masyarakat. Artinya, pengembangan sebuah kurikulum sekolah melibatkan pelbagai pihak dengan perannya masing-masing.

Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum itu selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah yang mengembangkannya. Pemberlakuan KTSP diharapkan menjadikan sekolah lebih berinisiatif dan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Karena KTSP

dikembang-kan oleh sekolah dengan guru sebagai salah satu elemen pengembangnya, maka Anda perlu memiliki wawasan dan keterampilan yang cukup dalam mengembangkan kurikulum bagi sekolah tempat Anda bertugas.

Untuk itulah, pada unit ini Anda akan mempelajari apa peran pengembang kurikulum sekolah dan bagaimana strategi pengembangan kurikulum sekolah. Dengan kata lain, usai mempelajari kedua subunit dalam unit 5 ini Anda dihapkan dapat:

1. mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah;
2. menganalisis peran pengembang kurikulum sekolah;
3. menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum; serta
4. menjabarkan strategi pengembangan kurikulum.

Agar pelbagai kemampuan itu dapat Anda kuasai dengan baik, pelajarilah uraian yang terdapat dalam unit ini dengan cermat, serta bahan ajar pendukung lainnya yaitu video dan web. Kerjakan tugas atau latihan, serta tes formatif yang tersedia, sebagai sarana untuk menilai sendiri dan sekaligus memantapkan perolehan hasil belajar Anda. Setelah Anda mengerjakan latihan, silakan bandingkan jawaban Anda dengan rambu-rambu latihan yang terdapat di bawahnya. Sementara itu, kunci tes formatif setiap subunit tersedia pada akhir unit.

Semoga Anda berhasil menyelesaikan unit ini dengan menggembirakan.

Subunit 1

Peran Pengembang Kurikulum Sekolah

Pengantar

Saudara, otonomi pendidikan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia persekolahan untuk dapat berinteraksi dan berkontribusi secara lebih intensif. Interaksi intensif ini menjadi sangat wajar karena keberadaan sekolah memang tidak dapat dilepaskan dari dunia luar (masyarakat). Masyarakat adalah pengguna jasa pendidikan. Mereka memiliki dan menaruh harapan pada sekolah untuk dapat memberikan bekal pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karenanya, sangatlah wajar apabila mereka disertakan dan turut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tentu harus diatur sehingga keterlibatan mereka dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan dan peningkatan mutu sekolah. Bukan sebaliknya.

Berangkat dari konsepsi demikian, maka keberadaan dan keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, dan masyarakat, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Saudara, siapakah yang mesti turut serta pengembangan kurikulum sekolah? Setelah Jerome Bruner, yang mengutamakan struktur disiplin ilmu, para ahli disiplin ilmu dari universitas banyak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Para ahli tersebut umumnya lebih memandang kurikulum sebagai wahana penyampai ilmu pengetahuan. Mereka beranjak dari asumsi bahwa mengembangkan kurikulum ialah menyusun suatu dokumen yang menjadi pegangan tentang apa yang harus dipelajari siswa.

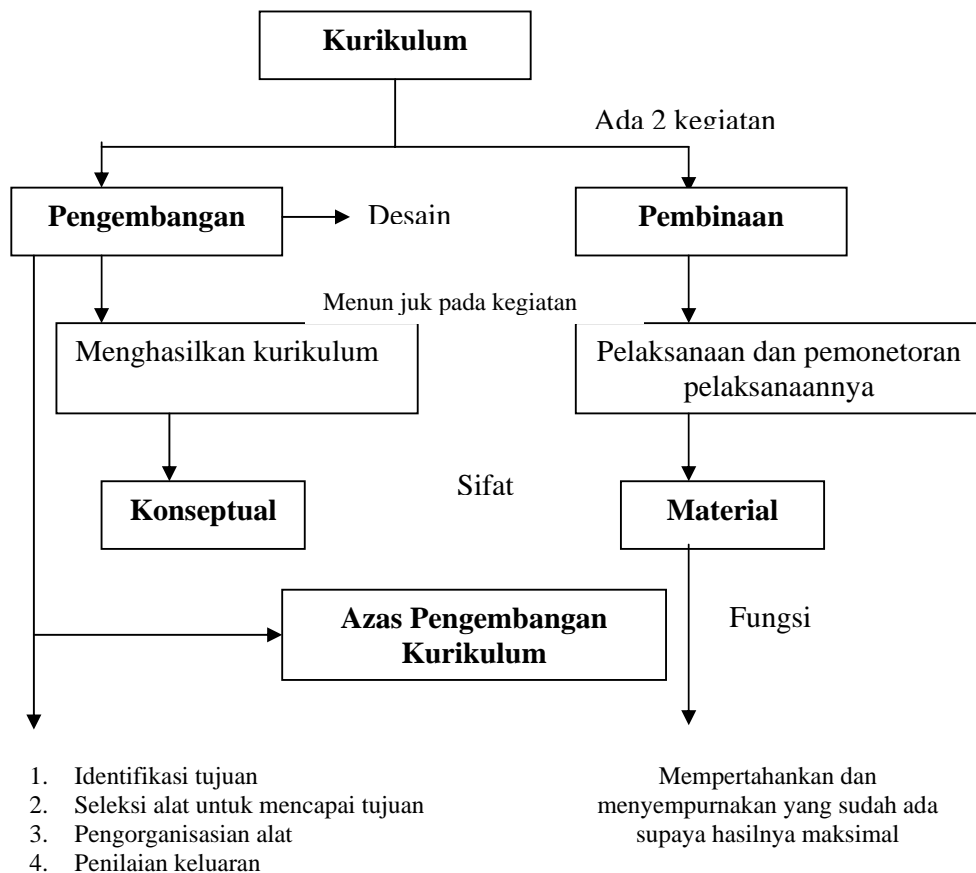
Kurikulum sesungguhnya ialah apa yang terjadi di kelas dalam interaksi siswa dengan guru dan siswa lainnya dan dengan lingkungan. Di dalam kelas, kurikulum adalah benda hidup yang dinamis. Bukan sekedar kumpulan dokumen cetak belaka. Guru harus menerjemahkan kurikulum itu dalam bentuk interaksi hidup antara guru dan siswa. Untuk melaksanakan kurikulum itu dan juga dalam usaha untuk mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat tertentu diperlukan peserta lain. Mereka adalah pelbagai unsur yang setiap hari terlibat dalam kurikulum yakni guru, murid, kepala sekolah dan pegawai sekolah dari Dinas Pendidikan.

Berbicara tentang pengembangan kurikulum, sebenarnya ada dua kegiatan yang berbeda. Sebelum uraian dilanjutkan, cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini!

Latihan 1

1. Apakah perbedaan antara pengembangan dan pembinaan kurikulum?
2. Bagaimanakah kedudukan pengembang kurikulum dalam kegiatan pengembangan atau pembinaan kurikulum?

Untuk memberikan gambaran tentang kegiatan pengembangan dan pembinaan kurikulum, perhatikan skema berikut ini.



Dari skema di atas dapatlah kita katakan bahwa pengembangan kurikulum berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum, sedangkan pembinaan kurikulum berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan kurikulum dan pemotretan

pelaksanaannya. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada, supaya hasilnya maksimal.

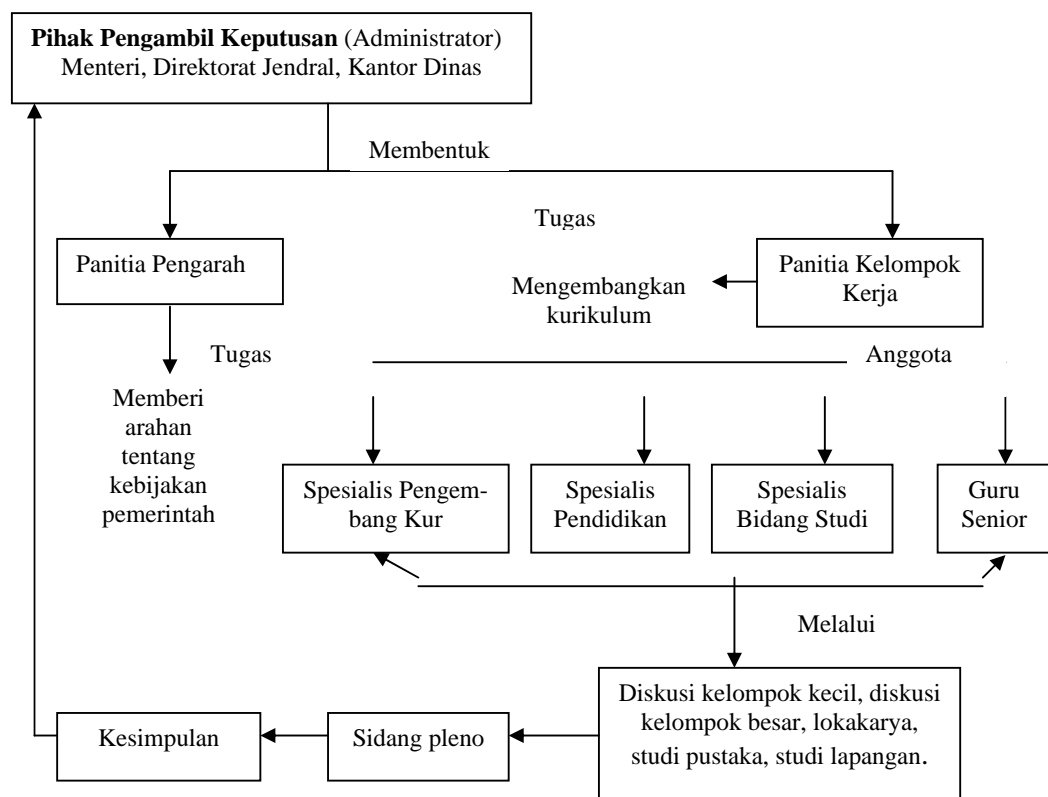
Berkaitan dengan tim pengembang kurikulum, mereka berkedudukan dalam kegiatan pengembangan. Ketika pengembangan kurikulum masih bersifat sentralistik, maka tim pengembang berada pada tingkat nasional. Namun, ketika pengembangan kurikulum bersifat desentralistik, tim pengembang kurikulum dapat berada pada tingkat nasional, propinsi, kota/kabupaten, dan sekolah.

Penetapan siapa saja tim pengembang kurikulum tak dapat dilepaskan dari model pengembangan kurikulum yang dianut, seperti yang sudah Anda pelajari pada Unit 3 sebelumnya. Untuk mengingatkan akan hal itu, kerjakan latihan berikut ini

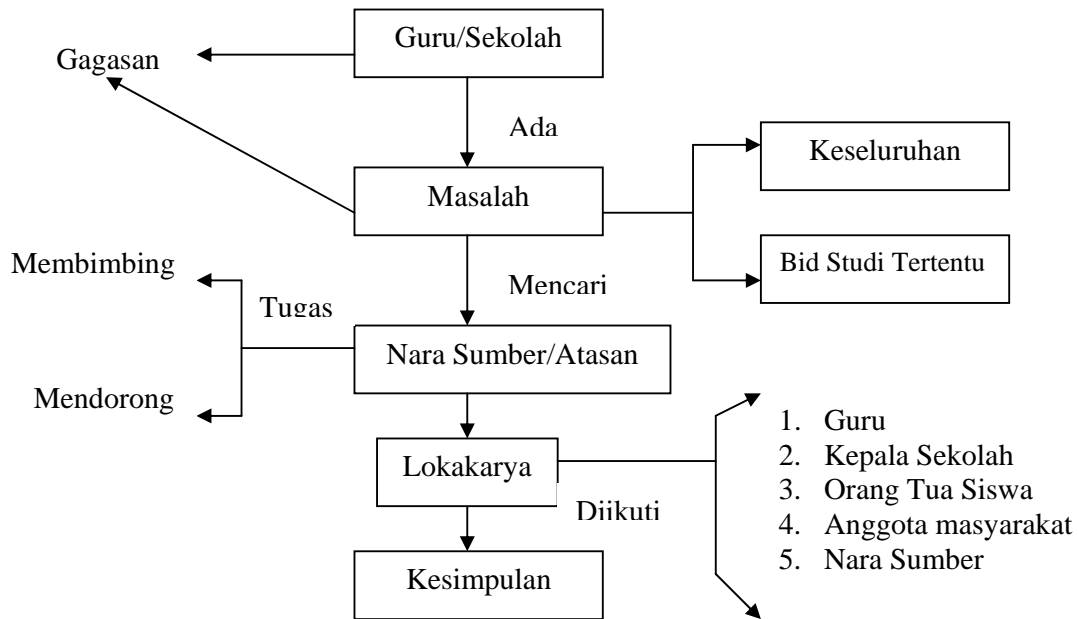
Latihan 2

Perhatikan dua langkah model pengembangan kurikulum berikut ini! Selanjutnya, menurut Anda langkah pengembangan mana yang sesuai diterapkan untuk mengembangkan KTSP? Kalau keduanya tidak ada yang cocok, lalu model pengembangan kurikulum seperti apa yang sebaiknya digunakan?

1. Langkah-langkah Model Administrasi



2. Langkah-langkah Model Grass Roots.



Model pengembangan kurikulum yang pertama, yaitu model administrasi, cenderung dilakukan pada pengembangan kurikulum yang sentralistik, sehingga tidak cocok digunakan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sementara, model kedua, yaitu model grass roots, cenderung lebih cocok digunakan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan selanjutnya Anda juga masih dapat memilih atau memadukan model-model pengembangan kurikulum yang lain.

Kebijakan mengenai pengembangan KTSP merupakan suatu bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi pendidikan. Sekolah diberi kesempatan yang lebih leluasa untuk mengembangkan program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen antara lain kepala sekolah, guru dan karyawan, komite sekolah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat, pakar kurikulum setempat, dan pejabat daerah setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai komponen masyarakat sehingga pengembangan kurikulum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat.

Pendelegasian wewenang pengembangan kurikulum kepada sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Melalui otonomi, pihak sekolah dipacu untuk dapat memberdayakan semua sumber daya yang ada secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber belajar. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat memiliki

kemandirian dalam mengelola pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikannya secara efisien. Dalam konteks ini, pemeran utama dalam pengembangan KTSP adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Pihak lain yang dapat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum itu diantaranya adalah pemerintah, perguruan tinggi, ahli kurikulum dan berbagai lapisan masyarakat umumnya, seperti golongan agama, industri, politik, dan juga siswa

Dengan kata lain, pengembang kurikulum sekolah dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok intern (dari dalam) sekolah dan kelompok ekster (dari luar) sekolah. Kontribusi dari pihak luar biasanya bersifat umum. Sekolahlah yang harus menerjemahkannya dalam kegiatan yang lebih spesifik dan operasional. Lalu, apakah peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa?

Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Padanyalah kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal. Secara umum, peran dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut.

Pertama, peran sebagai sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Lalu, bagaimana implementasinya dalam pengembangan kurikulum sekolah?

Dalam aspek perencanaan, kepala sekolah merupakan pelaku yang selalu terlibat dan bahkan sering menjadi tumpuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum, mulai dari konsep hingga hal-hal yang lebih teknis. Bisa jadi ia tidak terlibat secara fisik pada keseluruhan kegiatan perencanaan, namun kepala sekolah terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu.

Dalam aspek pengorganisasian, kepala sekolah mengorganisasikan unsur-unsur, baik unsur manusia maupun unsur nonmanusia. Unsur-unsur itu diorganisasikan untuk membangun sinergi antarunsur. Dari sinergi tersebut tercipta daya baru dengan kualitas yang lebih bernilai bagi pengembangan kurikulum sekolah. Dalam aspek pelaksanaan, kepala sekolah juga sebagai pelaksana lapangan. Ia adalah orang yang mengkoordinasikan pengembangan kurikulum, dan sekaligus menerjadikan atau menerapkan kurikulum. Kepala sekolah mengemban tugas memimpin. Dalam hal ini kepala sekolah mengarahkan dan memberi komando. Hal yang mendasar di sini adalah kepala sekolah harus berperan sebagai penanggung jawab atas pengembangan kurikulum sekolah.

Kedua, peran sebagai inovator. Sebagai tokoh penting di sekolah, kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide baru yang kreatif. Pengembangan kurikulum sering kali bermula dari gagasan kepala sekolah. Mengingat kedudukannya sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab atas sekolah yang dipimpinnya, maka pada diri kepala sekolah cenderung muncul dorongan-dorongan untuk terus memajukan sekolah. Karena kewenangan yang dimilikinya, ide-ide barunya menjadi lebih terbuka untuk diimplementasikan di sekolah. Begitu pula dalam konteks pengembangan kurikulum sekolah ini. Kepala sekolah harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan, sehingga program sekolah (kurikulum) yang dijalankan senantiasa aktual/mutakhir.

Ketiga, peran sebagai fasilitator. Dalam pengembangan kurikulum, pelaksana teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus yang ditunjuk. Namun demikian, kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Kepala sekolah harus membantu mengatasi persoalan, melayani konsultasi tim, dsb.

Kepala sekolah mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan kurikulum. Sebagai pemimpin profesional, ia menerjemahkan perubahan masyarakat dan kebudayaan, termasuk generasi muda, ke dalam kurikulum. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan, baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Karena itu, kepala sekolah perlu mempunyai latar belakang yang mendalam tentang teori dan praktik kurikulum. Perubahan kurikulum hanya akan berjalan dengan dukungan dan dorongan kepala sekolah. Ia dapat membangkitkan atau mematikan perubahan kurikulum di sekolahnya.

Masih banyak pihak lain, selain kepala sekolah, yang dapat membantu pengembangan kurikulum. Namun demikian, kepala sekolah dan guru merupakan pemeran utama, yang perlu menerima, mempertimbangkan, dan memutuskan apa yang akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kepala sekolah dan stafnya mesti bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdiknas.

Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah

Saudara, kalau kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Gurulah pemeran utama aktivitas sekolah (pendidikan dan pembelajaran). Karena itu, tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahlian.

Bukan sekedar ”tukang mengajar”. Dia harus paham mengenai apa yang disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana menyampaikannya. Dengan demikian, apa yang dihadapi dan menjadi tugas profesi guru adalah menyangkut hal yang bersifat dinamis. Juga, karena adanya benang merah antara “apa, mengapa, dan bagaimana” maka guru juga menjadi pusat penggerak dinamika itu. Keberadaan guru menjadikan sesuatu bersifat dinamis.

Karena tugas guru sehari-hari terkait dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah, maka peran guru dalam pengembangan kurikulum sekolah di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan. Keputusan mengenai kurikulum sekolah secara institusional terletak pada tangan kepala sekolah. Dalam konteks ini guru adalah pemberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Sebagai seorang yang profesional, guru memiliki keahlian di bidangnya, termasuk dalam hal kurikulum atau pendidikan. Oleh karenanya, dalam rangka pengembangan kurikulum, guru perlu memiliki gagasan/ide kreatif untuk mewujudkan harapan-harapan dari pelbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

Kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Konsep ini dapat ditarik kedalam dua konteks. *Kesatu*, guru sebagai pelaksana proses pengembangan kurikulum sekolah terlibat sebagai tim yang ditunjuk untuk “membuat” kurikulum sekolah. Di sini, guru harus mampu berpikir luas dan komprehensif, bahkan menjangkau masuk ke ruang masa depan. Bersama tim, guru berpikir secara keseluruhan mengenai kurikulum dan segenap potensi yang dimiliki sekolah.

Selanjutnya, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan sekolah. Peran ini berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengampu proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Di sini, guru menjabarkan kurikulum sekolah menjadi bentuk-bentuk program yang lebih rinci (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran) sampai dengan pengejawantahannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran.

. Pada umumnya guru akan dapat menilai secara bersifat kritis apakah hasil pengembangan itu terlalu teoretis, apakah dapat diterapkan dalam kelas pembelajaran, atau apakah cara lama lebih praktis dan bermanfaat daripada cara baru yang terlampaui banyak menyita waktu dan tenaga. Jika guru menyaksikan pelaksanaan kurikulum itu, bahkan mengalaminya sendiri, maka ia akan lebih mudah menerima pelbagai masukan.

Dalam melakukan perubahan kurikulum, hendaknya diselidiki dan dipertimbangkan sikap dan reaksi guru terhadap perubahan itu. Guru mempunyai pandangan sendiri tentang kurikulum. Keberhasilan perubahan yang terjadi bergantung

pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai guru dan taraf partisipasinya dalam perubahan itu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang memegang peranan dalam proses pengembangan kurikulum ialah guru karena dialah yang paling bertanggung jawab atas mutu pendidikan anak-didiknya. Guru menghadapi kesulitan tersendiri karena pada hakikatnya ia bekerja dalam dunia yang terisolasi. Apa yang dikerjakan dalam kelasnya tertutup bagi dunia luar. Jarang sekali pelajarannya dihadiri oleh orang luar, sehingga ia tidak memperoleh masukan tentang proses belajar-mengajar dalam kelasnya. Ia cenderung tenggelam dalam cengkeraman kegiatan rutin. Pengalaman mengajar yang bertahun-tahun cenderung kurang berdampak pada peningkatan profesionalismenya, karena tindak pembelajaran yang dilakukannya tidak berbeda dari waktu ke waktu. Hanya mengulang-ulang.

Profesionalisme guru akan dapat berkembang, apabila ia membiasakan diri untuk: (1) berunding dan bertukar pikiran dengan siswa, dan terbuka terhadap pendapat mereka, (2) belajar terus dengan membaca literatur yang terkait dengan profesinya, (3) bertukar pikiran dan pengalaman dengan teman guru-guru lainnya atau dengan kepala sekolah. Sikap keterbukaan ini memungkinkannya belajar dari murid, dari buku, dan dari orang lain. Perkembangan profesionalisme akan terbantu bila sekolah secara berkala mengadakan rapat atau diskusi khusus untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kurikulum serta perbaikannya.

Sebagian dari waktu libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk membicarakan kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan kurikulum dan secara bersama mencari usaha perbaikan. Hasil pembicaraan kemudian diterapkan di kelas masing-masing dan mendiskusikannya dengan guru yang lain. Dengan demikian, guru-guru lebih memahami seluk-beluk kurikulum dan menyadari peranannya sebagai pengembang kurikulum, atau pelaksana kurikulum yang kritis dan kreatif. Mereka akan lebih memahami bahwa gurulah unsur utama dalam kurikulum.

Pada penerapan kurikulum yang lalu guru belum menganggap dirinya seorang yang boleh berbicara, bahkan yang mempunyai keahlian dalam bidang kurikulum, khususnya dalam hal kurikulum kelas atau bidang studinya. Ia menganggap dirinya hanya sebagai pelaksana, ibarat tukang yang harus melaksanakan pekerjaan menurut instruksi. Jadi ia hanya terlibat dalam praktik, tanpa memikirkan apa yang dilakukannya.

Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah

Saudara, keberadaan komite sekolah kian bergulir dengan diberlakukannya otonomi sekolah. Keberadaan komite sekolah (dan dewan pendidikan) secara legal formal tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Dalam keputusan menteri ini, komite sekolah dimaksudkan sebagai *sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah*. Penamaannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Bisa saja misalnya dengan nama Majelis Madrasah, Majelis sekolah, Komite TK, dan sebagainya.

Uraian mengenai komite sekolah dalam bahasan ini pada dasarnya hanya akan dibatasi pada perannya dalam pengembangan kurikulum sekolah. Namun, untuk memperoleh pijakan yang cukup, lebih-lebih komite sekolah juga masih menjadi fenomena baru, maka dipandang perlu untuk disinggung terlebih dahulu hal-hal dasar atas keberadaan komite sekolah. Bahasan tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menjelaskan peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Pembentukan komite sekolah bertujuan: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; serta (3) menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan sekolah yang berkualitas.

Bertolak dari tujuan tersebut, komite sekolah memiliki peran sebagai berikut.

1. *Advisory agency*, yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah;
2. *Supporting agency*, yaitu pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga, dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah;
3. *Controlling agency*, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah; serta
4. *Mediate agency*, yaitu mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Lalu, bagaimana peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum? Peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum tidak terlepas dari keempat peran tersebut. Keempat peran itu saling terkait satu sama lain dan berlangsung secara simultan. Sebagai *advisory agence*, komite sekolah dapat memberikan/menyampaikan gagasan, usulan-usulan, atau pertimbangan-pertimbangan untuk

penyempurnaan kurikulum yang ada menuju kurikulum sekolah yang lebih baik. Gagasan, usulan, dan pertimbangan ini pada dasarnya dapat diarahkan kepada semua komponen kurikulum, struktur program kurikulum, dll. Walaupun secara pokok sudah tersedia kurikulum tingkat nasional, namun masih terbuka bagi pihak sekolah untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, dan penajaman-penajaman, serta dikemas dalam program inti atau program tambahan, kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dalam peran *advisory agence* ini pulalah komite sekolah terlibat dalam pengesahan kurikulum sekolah.

Karena terkait dengan peran sebagai *advisory agence*, maka komite sekolah berada dalam komitmen lanjutan. Muncullah peran berikutnya, yaitu *suporting agence*. Pengembangan kurikulum berkaitan dengan banyak persoalan, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, yang bersifat manusia dan non manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, dukungan komite sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga.

Kurikulum pada dasarnya adalah rencana program pendidikan. Karenanya, dalam pengembangan kurikulum harus dipikirkan dan direncanakan segenap aspek kurikulum. Misalnya, kalau gagasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan komite sekolah terkait dengan strategi pembelajaran (salah satu komponen kurikulum), maka dari awal harus sudah dipikirkan pula alat, bahan, media, dan sarana-prasarana. Dengan maksud mewadahi dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka di sinilah peran sebagai *suporting agence* menjadi sangat menentukan.

Sebagai *controlling agency*, komite sekolah melakukan kontrol atas penyelenggaraan program pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah harus diwujudkan. Karena masyarakat adalah pengguna jasa pendidikan dan melalui konsep *suporting agence* menjadi terlibat aktif, maka kepada masyarakat pulalah harus dibuka kesempatan untuk melakukan kontrol.

Dalam konteks pengembangan kurikulum, peran kontrol komite sekolah ini bisa pula diarahkan pada pengawasan, misalnya, apakah proses pengembangan yang ditempuh sudah memenuhi norma/ketentuan sebagaimana seharusnya, apakah pengembangan kurikulum telah memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, apakah sudah terukur untuk kemajuan anak, dsb. Peran ini harus dapat diterapkan agar pengembangan kurikulum benar-benar komprehensif.

Sebagai *mediate agency*, komite sekolah bertindak sebagai mediator antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan kurikulum secara baik menuntut keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak, karena memang pada

dasarnya urusan pendidikan tidak dapat diserahkan pada pemerintah (dinas pendidikan) dan sekolah saja. Tidak jarang lembaga-lembaga masyarakat masih bersikap masa bodoh dan tidak mau terlibat dalam urusan pendidikan/sekolah. Bahkan lembaga pemerintah pun (di luar Depdiknas) masih (sangat) banyak yang bersikap sama. Di sinilah komite sekolah mengambil posisi sebagai mediator, yang pada akhirnya terciptalah pemahaman, saling pengertian, saling dukung, dan sinergi. Dengan peran komite sekolah sebagai mediator, maka pengembangan kurikulum sekolah menjadi lebih terbuka dalam mengeksplorasi sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Program (kurikulum) sekolah pun menjadi lebih dinamis.

Pada akhirnya, dengan bersinerginya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum, hal itu akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih dinamis dan semakin besar peluangnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sekolah tidak semata-mata bermanfaat bagi pencapaian tujuan belajar anak didik, melainkan juga bermanfaat untuk memupuk dan menumbuhkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama bagi kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan/sekolah.

Peran siswa dalam pengembangan kurikulum

Pada umumnya siswa kurang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena memang mereka belum mempunyai kompetensi dalam bidang itu. Namun pada tingkat kegiatan kelas, bila guru bertanya, bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut-serta dalam perencanaan suatu kegiatan belajar, pada pokoknya mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. Di sekolah progresif kepada murid diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Partisipasi murid sama sekali tidak berarti bahwa keinginan mereka harus selalu dituruti akan tetapi pandangan mereka dapat dimanfaatkan, sekalipun keputusan berada di tangan guru. Memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, akan menimbulkan rasa benci bahkan protes, sekalipun tersembunyi, terhadap pelajaran dan sekolah yang mereka nyatakan dalam perbuatan yang tidak diinginkan.

Latihan 3

Analisislah kendala yang muncul dalam pengembangan kurikulum sekolah di lingkungan Anda. Bagaimanakah saran Anda untuk mengatasi kendala tersebut agar pengembangan kurikulum sekolah dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan

Rangkuman

Banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya ialah kepala sekolah, guru, komite sekolah dan siswa. Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah terlibat dalam tugas-tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide baru dan kreatif. Pengembangan kurikulum sering kali bermula dari gagasan kepala sekolah. Karena kewenangan yang dimiliki kepala sekolah, maka ide-ide barunya menjadi lebih terbuka untuk diimplementasikan di sekolah. Begitu pula dalam konteks pengembangan kurikulum sekolah ini. Kepala sekolah harus mampu manghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan, sehingga program sekolah (kurikulum) yang dijalankan senantiasa aktual/mutakhir. Dalam pengembangan kurikulum sekolah, guru memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan. Sebagai seorang profesional, guru memiliki keahlian di bidangnya, termasuk urusan kurikulum atau secara lebih luas mengenai pendidikan. Sebagai pelaksana proses pengembangan, guru dapat terlibat sebagai tim pengembang kurikulum sekolah. Di sini, guru harus mampu berpikir luas dan komprehensif, bahkan menjangkau masuk ke ruang masa depan. Guru sebagai pelaksana kurikulum adalah pengampu proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Di sini, guru menjabarkan kurikulum sekolah menjadi bentuk-bentuk program yang lebih detil/rinci (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran) sampai dengan pengejawantahannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran.

Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peran komite sekolah adalah sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediate agency. Dalam konteks pengembangan kurikulum sekolah, peran komite sekolah berlangsung mulai dari bagaimana sebuah pengembangan kurikulum digagas hingga proses pengembangan kurikulum berlangsung.

Tes Formatif 1

1. Jelaskan hakikat pengembangan kurikulum dalam kerangka otonomi pendidikan/sekolah!
2. Pengembangan kurikulum sekolah melibatkan berbagai pihak (kepala sekolah, guru, masyarakat/komite sekolah). Jelaskan hal apa saja yang harus dijadikan pijakan agar kurikulum yang dikembangkan tetap sesuai dengan hakikat dan fungsinya dalam dunia pendidikan!

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan Tes Formatif 1, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Apabila jawaban yang benar minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari subunit selanjutnya. Sebaliknya, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.

Subunit 2

Strategi Pengembangan

Pengantar

Saudara, pengembangan kurikulum bukanlah sebuah tindakan mekanistik. Tidak serta-merta setiap guru dapat mengembangkan kurikulum. Kegiatan itu memerlukan strategi yang memungkinkan kurikulum dapat dikembangkan sehingga membuahkan hasil yang baik.

Persoalan strategi pengembangan kurikulum itulah yang akan dibahas dalam subunit 2 ini. Usai mempelajari subunit ini Anda diharapkan memiliki kemampuan menganalisis strategi pengembangan kurikulum di sekolah.

Prinsip Pengembangan Kurikulum

Saudara, dalam strategi pengembangan kurikulum terdapat prinsip pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan prinsip di sini ialah asas yang dijadikan pokok/dasar berpikir dan bertindak dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Sebelum membahas uraian selanjutnya, cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini.

Latihan 1

Cermati Standar Isi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan KTSP. Jelaskan, apakah prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan KTSP!

Saudara, prinsip pengembangan kurikulum adalah:

1. Peningkatan keimanan, budi pekerti, dan penghayatan nilai-nilai budaya.
2. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika.
3. Penguatan integritas nasional.
4. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi.
5. Pengembangan kecakapan hidup.
6. Pilar pendidikan.
7. Komprehensif dan berkesinambungan.
8. Belajar sepanjang hayat.
9. Diversifikasi pengembangan kurikulum.

Strategi Pengembangan Kurikulum

Saudara, berangkat dari prinsip pengembangan kurikulum di atas, maka pijakan untuk menetapkan strategi pengembangan kurikulum dalam proses mengubah atau mengembangkan kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Mengubah sistem pendidikan

Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Depdiknas, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Di samping itu, pemerintah pusat pun memiliki sumber daya personalia yang profesional dan sumber daya lainnya untuk merencanakan perubahan kurikulum itu sebaik-baiknya.

Perubahan ini menyeluruh dan dijalankan secara seragam di seluruh negara. Usaha besar-besaran ini hanya dapat dikordinasikan oleh pemerintah pusat dengan menjelaskan kebijaksanaan, petunjuk pelaksanaan, dan buku pedoman. Strategi ini sangat ekonomis dari segi waktu maupun tenaga bila perubahan kurikulum itu dilakukan secara seragam dan menyeluruh.

Pendekatan perubahan kurikulum ini memiliki sejumlah kelemahan. Para pakar kurikulum yang dilibatkan biasanya kurang mencerminkan keterwakilan pemikiran dan keahlian para pakar yang tersebar di seluruh negara. Cara ini pun cenderung birokratis, sehingga terkesan menyusun kurikulum "di belakang meja tulis" oleh tokoh-tokoh yang tidak atau kurang menceburkan diri dalam praktik sekolah yang sebenarnya. Bila semua perubahan kurikulum hanya datang dari pemerintah pusat, dalam jangka panjang akan mengekang dan membatasi kreativitas para guru dalam mengembangkan kurikulum. Bagi para guru, perbaikan atau perubahan kurikulum kerap hanya berperan sebagai penerima kebijakan orang-orang yang secara resmi diberi status sebagai pemimpin urusan kurikulum.

2. Mengubah kurikulum tingkat lokal

Kurikulum yang nyata, yang riil, hanya terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah atau dalam kelas. Di sinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada. Dalam kelas kurikulum menjadi hidup, bukan hanya secarik kertas. Dalam menghadapi anak dengan segala macam karakteristiknya, setiap guru akan menghadapi masalah yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Guru harus mengadakan penyesuaian. Oleh karena itu, betapa pun ketat dan rincinya sebuah kurikulum, guru selalu mendapat kesempatan untuk mencobakan pikiran dan kreativitasnya.. Kelaslah yang menjadi garis depan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum.

Di bawah pimpinan kepala sekolah dapat diadakan rapat seluruh staf, setiap tingkatan, atau setiap bidang studi. Rapat-rapat mengenai pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara kontinu. Pengembangan yang sesungguhnya akan terjadi bila guru sendiri menyadari kekurangannya, baik karena pemikirannya sendiri, interaksi dengan siswa, maupun diskusi dengan teman guru lainnya. Usaha pengembangan yang dijalankan oleh guru-guru memerlukan kordinasi kepala sekolah.

Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu tetap bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku, akan tetapi sekolah berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Kurikulum seperti ini ada yang menyebutnya sebagai "kurikulum plus". Kurikulum resmi hanya memberikan kurikulum minimal yang diharapkan harus dicapai oleh segenap siswa di seluruh Indonesia. Sama sekali tidak dilarang memberi bahan yang lebih mendalam dan luas bagi anak-anak yang berbakat. Adanya perbedaan antara apa yang diajarkan di suatu sekolah tidak perlu mempersulit anak pindah sekolah, selama sekolah itu mengajarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau struktur ilmu, sedangkan isinya secara detail tidak esensial.

3. Memberikan pendidikan *in-service* dan pengembangan staf

Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. *In-service training* dianggap lebih formal, dengan rencana yang lebih ketat, dan diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf lebih baik tidak formal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Guru dengan menerapkan apa yang sudah diperolehnya dalam pendidikan *in-service* atau kegiatan pengembangan staf lainnya, misalnya dapat disuruh mengobservasi dan menilai dirinya dalam mengajar dengan melihat rekaman kegiatan mengajar yang ia lakukan.

4. Supervisi

Dahulu penilik sekolah mengunjungi sekolah untuk mengadakan inspeksi dan memberi penilaian terhadap guru dan sekolah. Kedatangannya dipandang sebagai hari mendung penuh rasa takut yang dihadapi guru dengan segala macam tipu muslihat. Kini pengertian supervisi sudah berubah. Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Supervisi adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Bila dirasa perlu, penilik sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana

melaksanakan suatu metode baru. Seorang penilik sekolah harus senantiasa mempelajari perkembangan kurikulum dan metode mengajar modern serta dapat pula menerapkannya. Dialah sebenarnya yang menjadi hulubalang dalam modernisasi pendidikan.

5. Reorganisasi sekolah

Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang sama sekali baru. Hal ini antara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya *team teaching*, *non-grading*, metode unit, dan *open school*, yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran, seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Hal serupa ini akan jarang terdapat di negara kita dewasa ini, kecuali bila diadakan eksperimen dengan metode baru, misalnya pengajaran modul.

6. Eksperimentasi dan penelitian

Negara kita tidak tertutup bagi macam-macam pembaruan dalam pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka pendidikan kita terhadap pengaruh dari negara-negara lain di dunia ini. Ciri kemajuan ialah perubahan dan perbaikan. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas.

Yang lebih mungkin dilaksanakan ialah eksperimentasi, yakni mencobakan metode atau bahan baru. Pada dasarnya setiap kurikulum baru harus diujicobakan lebih dahulu sebelum disebarkan ke semua sekolah. Pembaruan kurikulum tanpa uji coba terlebih dahulu sangatlah beresiko, karena dapat menghamburkan biaya dan tenaga, tanpa jaminan bahwa pembaruan itu akan membawa perbaikan.

Percobaan metode baru dilakukan secara berkala, antara lain sekolah pembangunan yang kemudian menjadi PPSI cukup dikenal. Sayang tidak berlanjut. Demikian pula CBSA dan "muatan lokal" serta yang lainnya diujicobakan.

Meskipun dalam skala kecil dan tidak sistematis, sebenarnya setiap guru pernah melakukan eksperimen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapinya. Misalnya, ketika ada murid yang suka ribut dalam kelas, guru menempatkannya di bangku paling depan, dengan hipotesis bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat murid itu akan berubah kelakuannya. Ada guru yang menganjurkan anak yang ketinggalan agar belajar bersama dengan murid

yang pandai, atau guru memberi tanggung jawab tertentu kepada murid yang nakal.

Langkah-Langkah dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah

Saudara, agar usaha pengembangan kurikulum di sekolah dapat berhasil baik, maka perlu diperhatikan langkah-langkah pengembangan kurikulum di sekolah. Langkah-langkah itu mencakup melakukan penilaian umum tentang sekolah, seperti: dalam hal apa sekolah itu lebih baik atau lebih rendah mutunya daripada sekolah lain; kesenjangan apa yang terjadi antara kenyataan dengan apa yang diharapkan berbagai pihak; serta sumber-sumber apa yang tersedia atau tidak tersedia. Kalau kita rinci dapat kita sajikan sebagai berikut.

1. Selidiki berbagai kebutuhan sekolah, antara lain kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan akan perubahan dan perbaikan.
2. Mengidentifikasi masalah serta merumuskannya, yang timbul berdasarkan studi tentang berbagai kebutuhan yang tersebut di atas, lalu memilih salah satu yang dianggap paling mendesak diatasi.
3. Mengajukan saran perbaikan, yang dapat didiskusikan bersama, apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, menilai maknanya bagi pengembangan sekolah, dan menjelaskan makna serta implikasinya.
4. Menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, cara mengevaluasi, menentukan bahan pelajaran, metode penyampaian, percobaan, penilaian, balikan, perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya.
5. Memilih anggota panitia, sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing.
6. Mengawasi pekerjaan panitia., biasanya oleh kepala sekolah. '
7. Melaksanakan hasil kerja panitia oleh guru dalam kelas. Karena pekerjaan ini tidak mudah, kepala sekolah hendaknya senantiasa menunjukkan penghargaan-nya terhadap pekerjaan semua pihak yang terlibat dalam usaha pengembangan kurikulum.
8. Menerapkan cara-cara evaluasi, apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan, karena apa yang indah di atas kertas belum tentu dapat diwujudkan.
9. Memantapkan perbaikan, bila ternyata usaha itu berhasil baik dan dijadikan pedoman selanjutnya.

Pada taraf permulaan hendaknya diambil suatu proyek yang sederhana, yang memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Ketidakberhasilan akan menimbulkan kekecewaan dan keengganan untuk mengadakan pengembangan di

masa mendatang. Perlu pula memilih orang-orang yang benar-benar memiliki motivasi untuk mengadakan pengembangan dan mempunyai kompetensi yang memadai. Perlu pula ditentukan batas waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Pengembangan kurikulum memerlukan waktu lama sebelum membudaya, kadang-kadang 2 sampai 5 tahun, bergantung pada luas pengembangan yang akan diadakan. Jadi, jangan didesak melakukannya dengan tergesa-gesa. Ada pengembangan kurikulum yang fundamental yang memakan waktu puluhan tahun. Sering kurikulum yang dijalankan masih mirip dengan kurikulum yang terdapat pada puluhan bahkan ratusan tahun yang silam. Perubahan kurikulum senantiasa melibatkan perubahan manusia yang melaksanakannya. Agar kurikulum berubah, maka guru sendiri harus berubah dan didorong untuk berubah.

Untuk keperluan pengembangan kurikulum ini, Anda harus banyak membaca tentang model pengembangan kurikulum serta pendekatannya. Pada unit VI akan dibahas lebih rinci tentang hasil kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat dengan mengembangkan strategi dan langkah pengembangan yang benar.

Rangkuman

- *Prinsip merupakan asas yang dijadikan pokok/dasar berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, prinsip ialah asas yang dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum.*
- *Strategi pengembangan kurikulum antara lain: (1) mengubah sistem pendidikan, (2) mengubah kurikulum tingkat lokal, (3) memberikan pendidikan in-service dan pengembangan staf, (3) supervisi, reorganisasi sekolah, (4) eksperimentasi dan penelitian*

Tes Formatif 2

1. Sebutkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum!
2. Jelaskan, hal apa saja yang bisa ditempuh dalam upaya pengembangan kurikulum!

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan Tes Formatif 2, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Apabila jawaban yang benar minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari unit selanjutnya. Sebaliknya, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. Pengembangan kurikulum dalam kerangka otonomi pendidikan/sekolah merupakan konsekuensi logis di era otonomi dan reformasi yang terjadi di Indonesia. Dengan pengembangan kurikulum yang dilakukan dan didasarkan pada kondisi sekolah maka kurikulum menjadi lebih realistis dan kontekstual. Dengan demikian, maka kurikulum sebagai perangkat pendidikan menjadi lebih maksimal bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan.
2. Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum sekolah, hal-hal yang harus tetap dijadikan pijakan agar kurikulum berada dalam hakikat dan fungsinya dalam pendidikan meliputi: (a) tetap berpijak pada kurikulum nasional, (b) terbangunnya sinergi peran dan fungsi pengembang, (c) tetap memperhatikan konsep-konsep pembelajaran/pendidikan, (d) memperhatikan harkat anak-didik, dsb. Keseluruhan hal ini harus benar-benar diperhatikan. Karena bisa saja, dengan otonomi sekolah muncul banyak keinginan dari banyak pihak dengan pertimbangan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Bila tidak terkontrol maka hal-hal yang substansial justru terabaikan.

Tes Formatif 2

1. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum meliputi:
 - a. Peningkatan keimanan, budi pekerti dan penghayatan nilai-nilai budaya.
 - b. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika.
 - c. Penguatan integritas nasional
 - d. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi.
 - e. Pengembangan kecakapan hidup
 - f. Pilar pendidikan
 - g. Komprehensif dan berkesinambungan.
 - h. Belajar sepanjang hayat
 - i. Diservikasi pengembangan kurikulum.

2. Hal-hal yang bisa ditempuh dalam upaya mengembangkan kurikulum meliputi: (a) mengubah sistem pendidikan, (b) mengubah kurikulum tingkat lokal, (c) melakukan pendidikan *in-service* dan pengembangan staf, (d) supervisi, (e) reorganisasi sekolah, (f) eksperimentasi dan penelitian. Bentuk-bentuk upaya ini berada dalam skala kewenangan yang dapat dilakukan oleh pengembang, sekolah, kantor dinas pendidikan, hingga departemen pada tingkat nasional.

Daftar Pustaka

- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1982. *Asas-asas Kurikulum*. Bandung: Jemmars
- Nurgiyantoro, Burhan. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah; Sebuah Pengantar Teoretis dan Pelaksanaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Glosarium

- Komite** : sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu
- Pengembang** : orang atau pihak yang mengembangkan
- Pengembangan** : proses atau cara dan perbuatan untuk menjadi lebih sempurna
- Prinsip** : asas yang dijadikan pokok/dasar berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, maka prinsip tersebut merupakan asas yang dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum
- Sekolah** : lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk memberikan dan menerima pelajaran
- Strategi** : ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan